

Jenis Dokumen : Usulan
Status Dokumen : LEI-V
No. Dokumen : LEI-V/5000-3
Tanggal : 27 Maret 2002

STANDAR LEI 5000-3

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT LESTARI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1. Pendahuluan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Katagorisasi.....	1
4. Acuan	2
5. Pengertian	2
6. Rincian Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat lestari.....	3

STANDAR LEI 5000-3

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT LESTARI

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan standar sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang merupakan turunan dari Standar LEI 5000. Mengacu kepada standar ini, panduan pelaksanaan sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dijelaskan dalam Pedoman LEI 99 Seri 40, Dokumen LEI-05 dan Dokumen LEI-06.

2. Ruang Lingkup

Standar ini merupakan kerangka penilaian sertifikasi PHBML dan menjadi acuan bagi unit manajemen dalam melaksanakan PHBML.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) lestari diartikan sebagai segala bentuk pengelolaan hutan dan hasil hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara-cara tradisional baik dalam bentuk unit komunitas, unit usaha berbasis komunitas (koperasi dalam arti luas), maupun individual berskala kecil sampai sedang, yang dilakukan secara lestari.

3. Katagorisasi

Sebagai bentuk pengelolaan hutan yang tumbuh dan berakar pada budaya masyarakat, PHBML memiliki banyak variasi. Demikian pula ukuran-ukuran kelestariannya berbeda-beda, dipengaruhi oleh status penguasaan lahan; status tataguna lahan di dalam tataruang; komoditas yang diusahakannya dan skala perusahaan produk-produk tersebut. Berdasarkan ketiga faktor tersebut dikenali 48 tipe PHBM (**Tabel 1**), yang secara sederhana dapat digolongkan lebih lanjut ke dalam 6 (enam) katagori berikut berdasarkan derajat sensitifitas kelestariannya:

- a) PHBM pada tanah-tanah yang berdasarkan tata guna tanah diperuntukkan sebagai hutan tetap kawasan lindung, dengan jenis hasil hutan yang diproduksi berupa kayu dan orientasi usahanya komersial;
- b) PHBM pada tanah negara yang berdasarkan tata guna tanah diperuntukkan sebagai hutan tetap kawasan budidaya kehutanan, dengan jenis hasil hutan yang diproduksi berupa kayu dan orientasi usahanya komersial;
- c) PHBM yang berada pada tanah-tanah hak adat dan hak milik yang berdasarkan tata gunanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya kehutanan, dengan jenis hasil hutan yang diproduksi berupa kayu dan orientasi usahanya komersial. Atau PHBM pada tanah-tanah yang berdasarkan tata gunanya diperuntukkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya kehutanan, dengan jenis hasil hutan yang diproduksi berupa hasil hutan non kayu dan orientasi usahanya komersial;
- d) PHBM pada tanah-tanah yang berdasarkan tata gunanya diperuntukkan sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya kehutanan, jenis hasil hutan yang diproduksinya berupa kayu atau non kayu, namun dengan orientasi subsisten;
- e) PHBM pada tanah-tanah yang berdasarkan tata gunanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan dengan jenis hasil hutan yang diproduksi berupa kayu atau non kayu, dan orientasi usahanya komersial;
- f) PHBM pada tanah-tanah yang berdasarkan tata gunanya diperuntukkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan dengan jenis hasil hutan yang diproduksi berupa kayu atau non kayu, namun orientasi usahanya subsisten.

4. Acuan

Standar LEI 5000, Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

5. Pengertian

Pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dirumuskan dari pengertian istilah umum dan istilah teknis kehutanan. Pengertian istilah-istilah berikut selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam standar ini :

- 4.1 **Berbasis masyarakat** berarti dikelola oleh masyarakat, baik dalam bentuk unit komunitas, unit usaha berbasis komunitas (koperasi dalam arti luas), maupun individual berskala kecil sampai sedang. Ciri utamanya adalah adanya pengaruh sistem sosial setempat yang cukup kuat ke dalam struktur pengambilan keputusan manajerial.
- 4.2 **Kelestarian Fungsi Produksi** adalah terjaminnya keberlanjutan pemanfaatan hasil hutan dan usahanya.
- 4.3 **Kelestarian Sumberdaya Hutan** adalah terjaminnya kemantapan dan keamanan kawasan hutan berbasis masyarakat, sehingga memberikan kepastian usaha jangka panjang.
- 4.4 **Kelestarian Hasil Hutan** adalah keberlanjutan dan/atau peningkatan produksi hasil hutan dari waktu ke waktu akibat peningkatan upaya pengelolaan hutan.
- 4.5 **Kelestarian Usaha** adalah kemampuan unit manajemen dalam mengelola hutan berbasis masyarakat untuk memberikan keuntungan (profit) dalam batas-batas kemampuan daya dukung hutan.
- 4.6 **Kelestarian Fungsi Ekologi** adalah terjaminnya fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies asli dan ekosistem di dalam unit manajemen.
- 4.7 **Kestabilan Ekosistem** adalah ukuran keseimbangan dinamis dari struktur dan fungsi ekosistem hutan berikut komponen-komponennya sehingga menjamin kapasitas produksi optimum sesuai dengan batas-batas daya lenting ekologisnya.
- 4.8 **Sintasan (*survival*) spesies endemik/langka/dilindungi** adalah kemampuan spesies flora-fauna endemik/langka/dilindungi untuk beradaptasi dengan habitat hutan berbasis masyarakat.
- 4.9 **Kelestarian Fungsi Sosial** adalah terjaminnya keberlanjutan fungsi perusahaan hutan bagi kehidupan masyarakat setempat yang tergantung kepada hutan, baik langsung maupun tidak langsung, secara lintas generasi.
- 4.10 **Terjaminnya Sistem Tenurial Masyarakat** adalah keberadaan serangkaian hak dan kewajiban yang mengatur hubungan antar pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan hutan yang bersumber dari pihak-pihak pengelola dan yang menjamin kehidupan masyarakat secara lintas generasi tidak diabaikan akibat keberadaan unit manajemen, sebagaimana yang tergambarkan dalam tata batas yang terdefinisikan secara jelas dan telah pula disepakati oleh pihak yang terkait di dalamnya.
- 4.11 **Terjaminnya Ketahanan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat** adalah kegiatan ekonomi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat tetap dapat berlangsung, termasuk terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka, bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat secara lintas generasi.
- 4.12 **Keadilan Manfaat** adalah upaya-upaya untuk menciptakan pembagian manfaat secara adil antara pihak-pihak yang terkait didalam pengelolaan.

- 4.13 **Manajemen Kawasan** adalah serangkaian kegiatan pengelolaan kawasan hutan yang bertujuan agar kawasan bersifat aman jangka panjang, melalui kegiatan pemantapan, penataan dan pengamanan kawasan.
- 4.14 **Pemantapan Kawasan** adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan pengakuan baik secara hukum maupun atas dasar kesepakatan pihak-pihak terkait.
- 4.15 **Penataan Kawasan** adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur kawasan hutan berbasis masyarakat menjadi unit-unit manajemen terkecil dalam kesatuan perusahaan hutan produksi.
- 4.16 **Pengamanan Kawasan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan dan gangguan-gangguan terhadap kawasan dan sumber daya hutan berbasis masyarakat.
- 4.17 **Manajemen Hutan** adalah serangkaian kegiatan pengelolaan hutan produksi yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan dan pengendalian dampak negatif perusahaan hutan, termasuk kehadiran unit manajemen, melalui kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial.
- 4.18 **Kelola Produksi** adalah serangkaian kegiatan untuk mengatur dan mempertahankan fungsi produksi dalam batas-batas daya dukung sumber daya hutan.
- 4.19 **Kelola Lingkungan** adalah serangkaian kegiatan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif kegiatan perusahaan hutan terhadap spesies dan ekosistemnya.
- 4.20 **Kelola Sosial** adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan meminimumkan dampak negatif perusahaan hutan, termasuk kehadiran unit manajemen, bagi kehidupan komunitas-komunitas setempat secara lintas generasi.
- 4.21 **Penataan Kelembagaan** adalah serangkaian kegiatan manajemen yang memungkinkan peningkatan kemampuan organisasi perusahaan hutan melalui penataan organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.
- 4.22 **Akuntabilitas Publik** adalah kemampuan untuk mempertanggung jawabkan aktifitas pengelola hutan kepada publik.
- 4.23 **Penataan Organisasi** adalah serangkaian kegiatan untuk menetapkan tata laksana pengambilan keputusan yang menjamin dimensi manajemen dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan produksi lestari.
- 4.24 **Peningkatan Sumber Daya Manusia** adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja di unit manajemen dalam melaksanakan dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan hutan.
- 4.25 **Manajemen Keuangan** adalah kebijakan unit manajemen yang dapat menjamin adanya alokasi biaya untuk reinvestasi terhadap sumber daya agar mendukung keberlanjutan usaha jangka panjang.

5. Rincian Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari

Untuk sementara, standar kriteria dan indikator yang diuraikan dalam dokumen ini masih dibatasi pada ukuran-ukuran kelestarian PHBM dengan produk utama kayu; sambil menunggu terselesaikannya standar menyangkut hasil-hasil hutan non kayu yang lebih kompleks sifatnya. Mengingat variasi PHBM yang tinggi, standar kriteria dan indikator yang disajikan adalah yang paling lengkap; dengan kemungkinan untuk menghilangkan beberapa indikator yang tidak relevan dengan tipe atau kategori PHBM yang dinilai, sesuai dengan skema sertifikasinya.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari akan dapat diwujudkan apabila dimensi hasil (*outcome*) dapat dicapai melalui serangkaian strategi dan kegiatan manajemen yang tepat (dimensi manajemen). Indikator pencapaian pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari dapat dirumuskan melalui matriks kerangka penilaian sebagaimana disajikan pada **Tabel 2**. Penjelasan yang berkaitan dengan kerangka penilaian PHBML dan matriks kriteria dan indikator pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari disajikan pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

Rincian Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari adalah sebagai berikut :

Kelestarian Fungsi Produksi

Prinsip

"Kelestarian Fungsi Produksi"

Kriteria dan Indikator

Kriteria 1. Kelestarian Sumberdaya

Indikator:

- P.1.1. Lokasi HBM sesuai dengan peruntukan lahan
- P.1.2. Status dan batas lahan jelas
- P.1.3. Perubahan luas penutupan lahan
- P.1.4. Manajemen pemeliharaan hutan
- P.1.5. Sistem silvikultur sesuai daya dukung hutan

Kriteria 2. Kelestarian Hasil

Indikator:

- P.2.1. Penataan areal pengelolaan hutan
- P.2.2. Kepastian Adanya Potensi Produksi untuk Dipanen Lestari
- P.2.3. Pengaturan hasil
- P.2.4. Efisiensi pemanfaatan hutan
- P.2.5. Keabsyahan Sistem Lacak Balak dalam hutan
- P.2.6. Prasarana pengelolaan hutan
- P.2.7. Pengaturan manfaat hasil

Kriteria 3. Kelestarian Usaha

Indikator:

- P.3.1. Kesehatan usaha
- P.3.2. Kemampuan akses pasar
- P.3.3. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- P.3.4. Tersedia tenaga trampil

P.3.5. Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan

P.3.6. Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat

Kelestarian Fungsi Ekologi

Kriteria - 1 : Stabilitas Ekosistem

- E1.1 Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi gangguan terhadap integritas lingkungan
- E1.2 Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik terhadap keseluruhan kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di lapangan
- E1.3 Dampak kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem (tanah, air, struktur dan komposisi hutan) dan intensitasnya terdokumentasi
- E1.4 Adanya rencana kelola lingkungan dan efektifitas kegiatannya

Kriteria - 2 : Sintasan Spesies Langka/Endemik/Dilindungi

- E2.1 Tersedianya informasi mengenai spesies langka/endemik/dilindungi dan agihan habitatnya yang penting dalam kawasan
- E2.2 Adanya upaya minimasi dampak kelola produksi terhadap spesies langka/ endemik/dilindungi

Kelestarian Fungsi Sosial

Kriteria - 1 : Kejelasan Sistem tenurial lahan dan hutan komunitas

- S1.1. Status lahan/areal tidak dalam proses konflik dengan warga anggota komunitasnya maupun pihak lain;
- S1.2. Kejelasan batas-batas areal dengan pihak lain;
- S1.3. Fungsi kawasan menurut kepentingan komunitas/publik secara jelas diakui sebagai kawasan hutan tetap;
- S1.4. Digunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis dan adil terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama;
- S1.5. Pelaku pengelolaan PHBM benar-benar warga komunitas, baik dijalankan sendiri atau bermitra.

Kriteria - 2 : Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas

- S2.1. Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi;
- S2.2. Penerapan teknik-teknik produksi minimal tetap mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan;
- S2.3. Kegiatan pengelolaan hutan maupun paska panen sejauh mungkin dikembangkan di dalam wilayah komunitas dan menggunakan tenaga kerja komunitas.

Kriteria - 3 : Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi

- S3.1. Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan hutan merupakan hubungan sosial relatif sejajar.

;

S3.2. Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam organisasi penyelenggaraan PHBM

Kriteria - 4 : Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas

- S4.1. Ada kompensasi atas kerugian yang diderita komunitas secara keseluruhan akibat pengelolaan hutan oleh kelompok dan disepakati seluruh warga komunitas;
- S4.2. Seluruh warga komunitas dan publik terbuka untuk terlibat dalam penyelenggaraan PHBM
- S4.3. Ada mekanisme pertanggungjawaban publik dari kelompok pengelola terhadap komunitas dan/atau publik

Tabel 1. Matriks Tipologi PHBML

Jenis Produk dan Orientasi Pengelolaan Lahan/Hutan Serta Penetapan Kawasan			Status Penguasaan Lahan			
			Hutan/Tanah Publik/Negara	Tanah Adat		Tanah Hak Milik Formal
				Komunal	Individual	
KAYU		KD	01	02	03	04
	Komersial	KBK	05	06	07	08
		KBNK	09	10	11	12
		KD	13	14	15	16
	Subsisten	KBK	17	18	19	20
		KBNK	21	22	23	24
NON KAYU		KD	25	26	27	28
	Komersial	KBK	29	30	31	32
		KBNK	33	34	35	36
		KD	37	38	39	40
	Subsisten	KBK	41	42	43	44
		KBNK	45	46	47	48

LAMPIRAN 1.

1. Penjelasan tentang Syarat Keharusan, Inti Kegiatan, dan Syarat Kecukupan

Dalam setiap kegiatan pengelolaan yang melibatkan cukup banyak proses atau faktor untuk pencapaian tujuan tertentu yang ditetapkan, diperlukan pengelompokan berdasarkan posisinya dalam sebuah pengelolaan. Pengelompokan berdasarkan posisi tersebut adalah syarat keharusan, inti kegiatan, dan syarat kecukupan.

Syarat keharusan adalah semua proses atau faktor yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum proses atau faktor lain dilakukan.

Inti kegiatan adalah semua proses atau faktor yang seharusnya dilakukan dalam suatu pengelolaan.

Syarat kecukupan adalah semua proses atau faktor yang dapat mendukung tercapainya tujuan pengelolaan.

2. Penjelasan Manajemen Kawasan

Rumusan manajemen kawasan dalam pengelolaan hutan produksi pada status hutan negara tidak dapat disamakan dengan hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas. Dengan demikian istilah "aman jangka panjang" menjadi kurang relevan untuk hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas.

Dalam hal hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas yang berdasarkan tata guna lahan seharusnya dipertahankan sebagai hutan, maka untuk menunjang keberadaan hutan tersebut diperlukan kebijakan insentif karena para pemilik hutan ini -- dengan mempertahankan hutannya -- telah menyumbangkan fungsi publik dari hutan itu. Bagi hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas yang berdasarkan tata guna hutan tidak harus dipertahankan sebagai hutan, maka hasil hutan yang diproduksi dapat dikecualikan sebagai obyek sertifikasi. Apabila pasar menghendaki sertifikat PHPL hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas, pengaturan mengenai proses penilaian dan pemberian sertifikatnya akan diatur dalam pedoman tersendiri.

3. Penjelasan Matriks Kerangka Penilaian

Matriks tersebut menjelaskan bahwa ketercapaian tujuan dapat diwujudkan melalui tiga kegiatan pokok unit manajemen (dimensi manajemen), yaitu manajemen kawasan, manajemen hutan, dan penataan kelembagaan. Informasi yang menjelaskan ketercapaian dimensi hasil melalui ketiga pokok kegiatan tersebut diterjemahkan dalam bentuk indikator-indikator.

4. Penjelasan Pembagian Dimensi Manajemen

Pembagian dimensi manajemen ke dalam manajemen kawasan, manajemen hutan, dan penataan kelembagaan dalam perumusan indikator untuk hutan milik dan hutan adat/rakyat/komunitas (*Community-based Forest Management/CBFM*) diperlukan penyesuaian kontekstual.

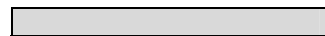
Tabel 2. Kerangka Penilaian PHBML pada Tingkat Unit Manajemen

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
1. Manajemen Kawasan 1.1. Pemantapan Kawasan 1.2. Penataan Kawasan 1.3. Pengamanan Kawasan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
2. Manajemen Hutan 2.1. Kelola Produksi 2.2. Kelola Lingkungan 2.3. Kelola Sosial	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
3. Penataan Kelembagaan 3.1. Penataan Organisasi 3.2. Sumber Daya Manusia 3.3. Manajemen Keuangan	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR

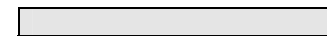
Catatan :



Syarat Keharusan



Inti Kegiatan



Syarat Kecukupan

LAMPIRAN 2. MATRIKS KRITERIA DAN INDIKATOR PHBML LENGKAP

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/ dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
1. Manajemen Kawasan 1.1. Pemantapan kawasan	P1.1. Lokasi HBM sesuai dengan peruntukan lahan					S1.1 Status lahan/ areal tidak dalam proses konflik dengan warga anggota komunitasnya maupun pihak lain S 1.2 Kejelasan batas-batas areal dengan pihak lain			
1.2. Penataan kawasan	P 1.2 Status dan batas lahan jelas P 1.3 Perubahan luas penutupan lahan	P2.1 Penataan areal pengelolaan hutan		E 1.1. Adanya tata batas dan rencana menyangkut kawasan-kawasan yang seharusnya dilindungi di dalam areal		S 1.3 Fungsi kawasan menurut kepentingan komunitas/publik secara jelas diakui sebagai kawasan hutan tetap S 1.4 Digunakannya tatacara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis dan adil terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama			

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
2. Manajemen Hutan 2.1 Kelola produksi	P1.4 Manajemen pemeliharaan hutan P1.5 Sistem silvikultur sesuai dengan daya dukung hutan	P2.2 Kepastian adanya potensi produksi untuk dipanen lestari P2.3 Pengaturan hasil 2.4 Efisiensi pemanfaatan hutan 2.5. Keabsahan system lacak balak dalam hutan	P3.1 Kesehatan usaha	E 1.2 Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi gangguan terhadap integritas lingkungan E1.3. Dampak kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem (tanah, air dan komposisi hutan) dan intensitasnya terdokumentasi	E 2.1 Tersedianya informasi mengenai spesies langka/endemik/dilindungi dan agihan habitatnya yang penting dalam kawasan		S2.1 Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi; S2.2. Penerapan teknik-teknik produksi minimal tetap mempertahankan tingkat penerapan kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan	S3.1 Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam operasional pengelolaan PHBM (pemilik, pekerja, pedagang) merupakan hubungan sosial simetris atau sejajar;	
2.2 Kelola Lingkungan	P1.6 Terjaminnya keberadaan dan macam hasil hutan yang dilakukan	P2.6 Prasarana pengelolaan hutan		E1.4. Adanya rencana kelola lingkungan dan efektifitas kegiatannya	E 2.2 Adanya upaya minimasi dampak kelola produksi terhadap spesies langka/endemik/dilindungi				

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
2.3 Kelola Sosial		P2.7 Pengaturan manfaat hasil hutan.	P3.2 Kemampuan akses pasar				S2.3 Kegiatan pengelolaan hutan maupu paska panen sejauh mungkin dikembangkan di dalam wilayah komunitas dan menggunakan tenaga kerja komunitas.		S4.1 Keberadaan hutan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada warga komunitas dengan mengacu pada institusi komunitas S4.2 Kerugian komunitas yang ditimbulkan oleh proses dalam pengelolaan PHBM dikompensasi sesuai dengan kesepakatan warga komunitas;
3. Penataan Kelembagaan 3.1 Akuntabilitas publik			P3.3 Sistem Informasi Manajemen						S4.3 Seluruh warga komunitas dan publik terbuka untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan PHBM;

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
3.2 Penataan organisasi			P3.4 Tersedianya tenaga terampil						S4.4 Mekanisme pertanggung jawaban publik yang diterapkan memungkinkan publik secara mudah mengakses dan memahaminya.
3.3 Peningkatan SDM									
3.4 Manajemen Keuangan			P3.5 Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan P3.6 Kontribusi terhadap peningkatan kondisi social dan ekonomi setempat						

3.5 Kepastian hukum								<p>S3.2 Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara (equal) di dalam pengambilan keputusan pengelolaan PHBM</p> <p>S3.3. Laki-laki dan perempuan serta perbedaan agama, suku bangsa, ras mempunyai hak dan kewajiban yang setara atas penguasaan suatu hutan negara yang dikelola dengan model PHBM</p>	
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

LAMPIRAN 3. MATRIKS KRITERIA DAN INDIKATOR PHBML UNTUK SKEMA 2 (TPC – B)

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/ dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
1. Manajemen Kawasan 1.2. Pemantapan kawasan						S1.2 Status lahan/ areal tidak dalam proses konflik dengan warga anggota komunitasnya maupun pihak lain S 1.2 Kejelasan batas-batas areal dengan pihak lain			
1.3. Penataan kawasan						S 1.3 Fungsi kawasan menurut kepentingan komunitas/publik secara jelas diakui sebagai kawasan hutan tetap S 1.4 Digunakannya tatacara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis dan adil terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama			

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
2. Manajemen Hutan 2.1 Kelola produksi				E 1.1 Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi gangguan terhadap integritas lingkungan E1.2 Dampak kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem (tanah, air dan komposisi hutan) dan intensitasnya terdokumentasi	E 2.1 Tersedianya informasi mengenai spesies langka/endemik/dilindungi dan agihan habitatnya yang penting dalam kawasan		S2.1 Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi; S2.2. Penerapan teknik-teknik produksi yang minimal tetap mempertahankan tingkat penerapan kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan	S3.1 Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam operasional pengelolaan PHBM (pemilik, pekerja, pedagang) merupakan hubungan sosial simetris atau sejajar;	
2.2 Kelola Lingkungan				E1.3 Adanya rencana kelola lingkungan dan efektifitas kegiatannya	E 2.2 Adanya upaya minimasi dampak kelola produksi terhadap spesies langka/endemik/dilindungi				

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
2.3 Kelola Sosial							S2.3 Kegiatan pengelolaan hutan maupu paska panen sejauh mungkin dikembangkan di dalam wilayah komunitas dan menggunakan tenaga kerja komunitas.		S4.1 Keberadaan hutan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada warga komunitas dengan mengacu pada institusi komunitas S4.2 Kerugian komunitas yang ditimbulkan oleh proses pengangkutan bibit maupun hasil panen (misalnya kerusakan jalan) dikompensasi sesuai dengan kesepakatan warga komunitas;
3. Penataan Kelembagaan 3.1 Akuntabilitas publik									S4.3 Seluruh warga komunitas dan publik terbuka untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan PHBM;

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
3.2 Penataan organisasi									S4.4 Mekanisme pertanggung jawaban publik yang diterapkan memungkinkan publik secara mudah mengakses dan memahaminya.
3.3 Peningkatan SDM									
3.4 Manajemen Keuangan									
3.5 Kepastian hukum								S3.3 Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara (equal) di dalam pengambilan keputusan pengelolaan PHBM S3.4. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara atas penguasaan suatu hutan negara yang dikelola dengan model PHBM	

LAMPIRAN 4. MATRIKS KRITERIA DAN INDIKATOR PHBML UNTUK JALUR I-C

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/ dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
1. Manajemen Kawasan 1.3. Pemantapan kawasan						S1.3 Status lahan/ areal tidak dalam proses konflik dengan warga anggota komunitasnya maupun pihak lain S 1.2 Kejelasan batas-batas areal dengan pihak lain			
1.4. Penataan kawasan						S 1.3 Fungsi kawasan menurut kepentingan komunitas/publik secara jelas diakui sebagai kawasan hutan tetap S 1.4 Digunakannya tatacara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis dan adil terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama			

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
2. Manajemen Hutan 2.1 Kelola produksi				E 1.1 Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi gangguan terhadap integritas lingkungan E1.2 Dampak kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem (tanah, air dan komposisi hutan) dan intensitasnya terdokumentasi			S2.1 Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi; S2.2. Penerapan teknik-teknik produksi yang minimal tetap mempertahankan tingkat penerapan kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan	S3.1 Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam operasional pengelolaan PHBM (pemilik, pekerja, pedagang) merupakan hubungan sosial simetris atau sejajar;	
2.2 Kelola Lingkungan				E1.3 Adanya rencana kelola lingkungan dan efektifitas kegiatannya					

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
2.3 Kelola Sosial		P2.7 Keabsahan CoC.					S2.3 Kegiatan pengelolaan hutan maupu paska panen sejauh mungkin dikembangkan di dalam wilayah komunitas dan menggunakan tenaga kerja komunitas.		S4.1 Keberadaan hutan memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada warga komunitas dengan mengacu pada institusi komunitas S4.2 Kerugian komunitas yang ditimbulkan oleh proses pengangkutan bibit maupun hasil panen (misalnya kerusakan jalan) dikompensasi sesuai dengan kesepakatan warga komunitas;
3. Penataan Kelembagaan 3.1 Akuntabilitas publik									S4.3 Seluruh warga komunitas dan publik terbuka untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan PHBM;

DIMENSI MANAJEMEN (Strategi Pencapaian Hasil)	DIMENSI HASIL								
	Kelestarian Fungsi Produksi			Kelestarian Fungsi Ekologi		Kelestarian Fungsi Sosial			
	Kelestarian Sumberdaya	Kelestarian Hasil	Kelestarian Usaha	Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara	Sintasan spesies langka/endemik/dilindungi dapat dipertahankan	Kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas	Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas	Terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi	Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas
3.2 Penataan organisasi									S4.4 Mekanisme pertanggung jawaban publik yang diterapkan memungkinkan publik secara mudah mengakses dan memahaminya.
3.3 Peningkatan SDM									
3.4 Manajemen Keuangan									
3.5 Kepastian hukum								S3.3 Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara (equal) di dalam pengambilan keputusan pengelolaan PHBM S3.4. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang setara atas penguasaan suatu hutan negara yang dikelola dengan model PHBM	

